

## Siaga Bencana, Heru Budi Bentuk Satgas Kurangi Risiko Gempa

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penilaian Gedung dan Nongedung Untuk Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, satgas tersebut dibentuk karena Jakarta dinilai memiliki karakteristik tanah lunak dan dikelilingi beberapa sumber gempa. Karena itu, diperlukan mitigasi terpadu sejak dini.

“Dengan dibentuknya Satgas Penilaian Gedung dan Nongedung, diharapkan kita dapat bersama-sama mengurangi risiko gempa bumi untuk menjamin keberlangsungan usaha, meminimalkan korban jiwa, kerugian infrastruktur dan gangguan aktivitas layanan masyarakat,” ujar Heru dalam keterangannya, Selasa (30/5).

Satgas tersebut, ia melanjutkan, terdiri atas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Riset dan

Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Selain itu, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DKCTRP), organisasi masyarakat (Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Jakarta Rescue), KADIN DKI Jakarta, Asia Pacific Alliance for Disaster Management (APAD) Indonesia, dan Universitas Tarumanagara.

“Kegiatan ini menjadi upaya nyata bersama dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Tangguh Bencana,” ujar Heru.

Ia melanjutkan, satgas memiliki tugas mulai dari melakukan pemantauan terhadap keandalan gedung dan nongedung di Jakarta dalam menghadapi ancaman gempa bumi, memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan gedung, hingga melakukan koordinasi intensif dengan lembaga terkait. ● yan

FOTO/ANTARA



**BANTUAN SOSIAL BERAS UNTUK KPM**

Petugas menata Bantuan Sosial Beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (30/5). Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memberi mandat kepada PT Pos Indonesia untuk menyalurkan beras bantuan kepada 21,3 juta KPM di 38 provinsi dengan mengoptimalkan stok beras Bulog yang berada di 26 kantor wilayah se-Indonesia.

## KJP-KJMU Tak Kunjung Disalurkan, Sekda DKI: Agar Tak Salah Sasaran

**JAKARTA (IM)** - Inspektoriat DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat angkat bicara terkait Pemprov DKI Jakarta yang belum menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Syaefuloh memastikan bahwa pihaknya bakal berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada semua siswa di Jakarta.

“Yang paling utama Pemprov DKI memiliki komitmen untuk memberikan bantuan dalam rangka memberikan memastikan pelayanan pendidikan untuk semua warga Jakarta,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Selasa (30/5).

Ia menyampaikan, bahwa Pemprov DKI sedang memproses pencairan KJP dan KJMU untuk para siswa serta mahasiswa di Jakarta.

Namun, proses pencairan itu harus hati-hati supaya tidak salah sasaran karena dari data yang dimiliki Dinas Pendidikan ada beberapa anak yang pindah sekolah ke luar Jakarta.

Sebelumnya, Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyoroti Pemprov DKI Jakarta soal uang Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum disalurkan ke penerima.

Inspektoriat DKI Jakarta, Syaefuloh mengatakan, masalah KJP bakal menjadi perhatian pihaknya selama 60 hari ke depan.

“Iya ada temuan BPK tadi salah satunya mengenai KJP yang belum tersalurkan, itu tentu menjadi perhatian kami untuk kita ditindaklanjuti sesuai dengan amanat dan rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari ke depan,” kata Syaefuloh.

Menurutnya, alasan Kartu Jakarta Pintar belum tersalurkan karena Pemprov DKI harus berhati-hati hari-hari menggelontorkan uang bantuan ke siswa sekolah.

Sebab, Pemprov DKI menemukan ada beberapa siswa yang sudah pindah sekolah ke luar Jakarta dan meninggal dunia.

“Terus kami telusuri untuk memastikan bahwa penerima bantuan itu adalah yang benar-benar berhak,” tandasnya. ● yan

## Satgas Akan Cek Kondisi Balai Kota DKI dan Menara Saidah

**JAKARTA (IM)** - Satuan Tugas (Satgas) Penilaian Gedung dan Nongedung disebut mengecek kondisi Gedung Balai Kota DKI Jakarta dan Menara Saidah pada Selasa (30/5). Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji berujar, satgas akan mengecek struktur gedung, jalur evakuasi, dan perlengkapan bahaya kebakaran.

“Hari ini, mereka (Satgas Penilaian Gedung dan Nongedung) akan melakukan pemantauan di Gedung Balai Kota DKI sebagai simbol pemerintahan provinsi,” ujar Isnawa di Balai Kota DKI, Selasa (30/5).

“Yang kedua, kami akan mengecek Menara Saidah di Jakarta Selatan,” lanjut dia.

Isnawa menyebutkan, usai mengecek Gedung Balai Kota DKI dan Menara Saidah, Satgas Gedung dan Nongedung akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengecekan.

Rekomendasi akan diberikan kepada pengelola gedung yang diperiksa. Adapun rekomendasi berisi hal-hal yang harus dibenahi di gedung yang diperiksa.

Isnawa melanjutkan, per bulan, Satgas Penilaian Gedung dan Nongedung akan memeriksa dua bangunan atau non-bangunan.

Menurut dia, Satgas Penilaian Gedung dan Nongedung diproyeksikan bakal memeriksa empat gedung dalam dua bulan ke depan.

“Untuk tahap selanjutnya, pemeriksaan akan dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan dengan menasar pada fasilitas umum dan fasilitas publik yakni Pasar Kramatjati, Apartemen Kalibata City, RSUD Koja, dan SMAN 99 Jakarta,” jelas Isnawa.

Untuk diketahui, Satgas Penilaian Gedung dan Nongedung mengemban tugas untuk mengurangi dampak atau risiko bencana gempa bumi di Jakarta usai tak lagi menjadi Ibu Kota pada 2024.

Satgas Penilaian Gedung dan Nongedung dibentuk oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

“Dengan dibentuknya Satgas Penilaian Gedung dan Nongedung, diharapkan kami dapat bersama-sama mengurangi risiko gempa bumi,” ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa. ● yan

# Pj Gubernur DKI Komitmen Ciptakan Kawasan Niaga yang Taat Aturan

Pemrov DKI Jakarta terus mengupayakan penataan kawasan sesuai regulasi. Bangunan yang tidak sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku akan mendapatkan peringatan hingga sanksi administrasi.

**JAKARTA (IM)** - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menciptakan kawasan niaga yang aman,

nyaman dan mematuhi aturan yang berlaku. Ia juga mengapresiasi warga yang peduli terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi polemik

yang muncul pascapembongkaran bangunan yang dianggap melanggar aturan di Komplek Pertokoan Pasar Muara Karang atau yang dikenal Ruko Niaga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Saya terus mendukung langkah semua pihak, termasuk RT untuk mengakkan kawasan niaga yang aman dan nyaman. Tentunya semua bangunan harus sesuai dengan peruntukan dan zonasi yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Heru melalui keterangan tertulis, Selasa (30/5).

Pemerintah berharap langkah tersebut didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk menciptakan lingkungan niaga yang nyaman dan aman.

“Saya berharap semua pihak selalu menjaga komunikasi yang baik. Utamakan retribusi warga di tingkat kelurahan,” tandasnya.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan penataan kawasan sesuai regulasi. Bangunan yang tidak sesuai

peruntukan dan aturan yang berlaku akan mendapatkan peringatan hingga sanksi administrasi.

Misalnya, yang terbaru adalah pembongkaran bangunan yang melanggar aturan di Ruko Niaga Pluit. Saat ini, Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Nomor e-0001/PA.01.00 untuk mengembalikannya sesuai ketentuan zonasi, yakni saluran air dan jalan. ● yan

## Kabupaten Bekasi Wajibkan Vaksin Bagi Hewan Kurban dari Luar Daerah

**KABUPATEN BEKASI (IM)** - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mewajibkan pemberian vaksinasi terhadap hewan kurban yang datang dari luar daerah maksimal 21 hari sebelum dipotong untuk memastikan dapat dikonsumsi dengan aman saat Hari Raya Idul Adha nanti.

“Hewan kurban terutama dari daerah yang ada kasus PMK (penyakit mulut dan kuku) serta LSD (Lumpy Skin Disease) diwajibkan telah menerima vaksinasi dan terjamin kesehatannya,” kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Dwian Wahyudiharto di Cikarang, Selasa (30/5).

Ia mengatakan penjual hewan kurban diharuskan memiliki bukti surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Jika tidak ada bukti telah divaksinasi, maka tidak dibolehkan un-

tuk diperjualbelikan di Kabupaten Bekasi.

Ia menjelaskan jika Kabupaten Bekasi menjadi daerah tujuan penjualan hewan kurban dari beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB, dan Bali. Jumlah hewan kurban dari daerah tersebut akan meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha setiap tahun.

“Jadi kalau belum terjamin kesehatannya belum boleh masuk ke Kabupaten Bekasi, bahkan kita syaratkan agar ada uji laboratorium dari daerah asal. Kalau dari hasil uji ada penyakit menular ya tentu tidak boleh masuk ke sini,” katanya.

Pihaknya memastikan hewan kurban asal Kabupaten Bekasi dalam kondisi sehat mengingat vaksinasi dan pengecekan terhadap hewan ternak lokal dilakukan secara rutin serta berkelanjutan.

“Kalau hewan kurban dari luar daerah saat diantar

ke sini melintasi beberapa wilayah atau kota. Di daerah yang dilintasi kita belum tahu apakah ada penularan penyakit atau tidak,” katanya.

Dia mengatakan saat ini jumlah hewan ternak yang terdeteksi menderita PMK di Kabupaten Bekasi terus berkurang menyusul pemberian vaksinasi keliling secara masif, sedangkan untuk penyakit LSD relatif mudah dideteksi, layaknya penyakit cacar pada manusia.

Pemerintah daerah menerjunkan tim medis berjumlah 30 orang terdiri atas petugas medis dan paramedis kesehatan hewan menjelang momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini.

“Ini imi bertugas melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang ada di Kabupaten Bekasi, terutama terkait kelayakan hewan tersebut dijadikan kurban pada hari raya nanti. ● yan

TAK PUNYA SERTIFIKAT TANAH

## Warga Pluit Putri Pertanyakan Terbitnya IMB Sekolah Swasta

**JAKARTA (IM)** - Warga Perumahan Pluit Putri, Penjaringan, Jakarta Utara mempertanyakan terbitnya surat izin mendirikan bangunan (IMB) untuk sebuah sekolah swasta di sana. Untuk diketahui, sekolah itu menjadi polemik karena berdiri di atas sebagai lahan yang dulunya ruang terbuka hijau (RTH).

“Yang jadi pertanyaan kami, IMB kok bisa keluar?” tutur Ketua RT 005/RW 06 Perumahan Pluit Putri, Johanna Senin (29/5) kemarin.

Untuk mengajukan IMB, Johanna menuturkannya, setiap orang harus mempunyai bukti kepemilikan sertifikat. Tetapi, Johanna menyebut bahwa sekolah internasional itu tidak memiliki sertifikat tanah. Johanna pun memperlihatkan surat bernomor HP.03.02/175-31.72/1/2020 dalam hal Penjelasan Status Lahan Fasum/Fasos Taman Pluit Putri RT 005/RW 06. Pada bagian kop surat, surat diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

“Berdasarkan penelitian pada data peta pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, lokasi yang dimaksud belum terdaftar/belum bersertifikat,” bunyi surat tersebut yang ditandatangani Kepala Kan-

tor Pertanahan Jakarta Utara, Hiskia Simarmata, pada 16 Januari 2020. Sebagai informasi, Johanna mengatakan, Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo alias Jakpro menyewakan sebidang tanah yang merupakan bagian dari RTH Perumahan Pluit Putri untuk mendirikan sekolah swasta.

“Hanya satu yang tidak bisa penuh, yaitu Jakpro tidak pernah bisa menunjukkan sertifikat atas tanah ini bahwa ini milik siapa. Jadi, enggak bisa dong cuma klaim pasang papan bertuliskan ‘tanah ini milik Jakpro,’” tutur Johanna.

“Harusnya dia bisa menunjukkan sertifikat, entah itu SHM, SHGB, atau apa pun. Tapi Jakpro selalu begitu, ‘pokoknya saya BUMD, saya juga pemerintah’. Mereka tidak pernah bisa menunjukkan bukti kepemilikan berupa SHM itu,” imbuh dia. ● yan



**TARGET PENYELESAIAN NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG**

Deretan permukiman penduduk semipermanen di bantaran Sungai Ciliwung, kawasan Kebon Manggis, Jakarta, Selasa (30/5). Pemerintah menargetkan normalisasi Sungai Ciliwung yang tersisa 17 kilometer itu selesai pada akhir 2024.

OPEN HOUSE	WAKTU OPEN HOUSE	LELANG	WAKTU LELANG
Selasa - Rabu, 06 - 07 Juni 2023	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 08 Juni 2023	11.00 WIB s/d Selesai
Senin - Selasa, 13 - 14 Juni 2023	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Rabu, 15 Juni 2023	11.00 WIB s/d Selesai
Selasa - Rabu, 20 - 21 Juni 2023	09.00 WIB s/d 17.00 WIB	Kamis, 22 Juni 2023	11.00 WIB s/d Selesai

**LOKASI OPEN HOUSE & LELANG**  
Jl. Palembang No.39 RT. 07 RW.06, Petungkang Utara, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan

**PENGUMUMAN**  
Telah Kehilangan SK IMB Nomor 05310/IMB/2001, tanggal 29 Juni 2001, atas nama GUNADI KARIM & NY. YESSICA IRIANI,  
Bagi pihak yang menemukan dapat menghubungi 0811-8889-660

**SYARAT & KETENTUAN LELANG:**  
1. Peminat LELANG MOBIL & MOTOR diwajibkan menyetorkan uang jaminan sebesar: - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 NPL MOBIL - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 NPL MOTOR  
2. Kondisi kendaraan yang akan dilelang adalah sebagaimana adanya (as is)  
3. Uang jaminan dan Pelunasan disetorkan ke rekening a/n PT. Power Asetindo Selaras A/C no. 5710999971 di BCA cab. Kyal Carinring, Jakarta Pusat.  
4. Apabila Pelunasan tidak terpenuhi dalam jangka waktu 5 (LIMA) hari setelah lelang maka pemenang lelang dinyatakan WANPRESTAS dan UANG JAMINAN AKAN HANGUS  
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Power Asetindo Selaras, Telp : (021) 21263003 / 08567899576 / 08139986569  
Email : powerteam@power-auction.id  
JAKARTTA, 31 Mei 2023  
PANTIA LELANG